

KEUANGAN DAERAH – PENJABARAN APBD – PERUBAHAN KETIGA

2026

PERBUP KAB BANGKA NO. 11, BD 2026/ 11, 7 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2025 tentang APBD 2026, Bupati menetapkan penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf a, Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, yang mengamanatkan Keperluan Mendesak salah satunya meliputi belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan. Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 100.3.3.1/278/BAKUDA/2026 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2026.

- Dasar Hukum Perbup Kab Bangka ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBD 2026; PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum; PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dari Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; PP No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan; PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga satuan Regional; PP No. 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBD TA. 2026; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban dan Operasional; PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam

APBD, dan Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020 Perubahan atas PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; PERMENPAN RB No. 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2026; Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab. Bangka No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda Kab. Bangka No. 4 Tahun 2025 tentang APBD TA 2026; Perbup Bangka No. 40 Tahun 2025 tentang penjabaran APBD TA 2026.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bangka No. 40 Tahun 2025 Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, uraian lebih lanjut Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2026.

- lampiran: -